

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah inisiatif global untuk pembangunan yang bersifat universal, tanpa membedakan antara negara berkembang dan negara maju. Ini merupakan ekspresi dari kesadaran bersama untuk menciptakan visi global bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama bagi semua negara di seluruh dunia.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang diselesaikan pada tahun 2015. Dengan diperkenalkannya SDGs, tujuannya adalah untuk melanjutkan kesuksesan 8 program MDGs dalam mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Salah satu fokus utama SDGs adalah mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah multidimensi. Sejalan dengan tujuan SDGs, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam menyediakan data yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan. SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *no one left behind* (Bappenas, 2023).

Indonesia mengambil langkah untuk mengakomodasi SDGs dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tahun 2017

mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perpres No 111 Tahun 2022 mengenai Implementasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, SDGs mempunyai 17 tujuan yang tercermin dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang dirangkum dalam 4 pilar utama yaitu, 1) Pilar pembangunan sosial, memiliki tujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat; 2) Pilar pembangunan ekonomi bertujuan agar tercapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; 3) Pilar pembangunan lingkungan memiliki tujuan agar tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; dan 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan (Bappenas, 2023).

Tujuan utama SDGs adalah tanpa kemiskinan (*no poverty*), meski kemiskinan telah menjadi masalah yang ada sejak lama dalam sejarah manusia. Kemiskinan bukan hanya berdampak pada individu, melainkan juga berpengaruh terhadap keseluruhan masyarakat. Situasi ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan di bidang sosial dan ekonomi, serta memperburuk kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang terus muncul dan menjadi beban yang besar bagi negara.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2023, terdapat sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia yang berada dalam kondisi miskin. Jumlah penduduk miskin ini mengalami penurunan sekitar 460 ribu orang jika dibandingkan dengan data bulan September 2022, atau mengalami penurunan sebesar 260 ribu orang jika dibandingkan dengan data bulan Maret tahun sebelumnya. Selain itu, persentase penduduk miskin secara nasional juga mengalami penurunan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yaitu dari 9,54% pada bulan Maret 2022 menjadi 9,36% pada bulan Maret 2023. Baik dari segi jumlah maupun persentase, data mengenai kemiskinan nasional pada bulan Maret 2023 merupakan yang paling rendah sejak awal pandemi Covid-19 menyebar (Ahdiat, 2023). Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah adanya ketidaksetaraan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks ini, wilayah pedesaan menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sebanyak 0,24 juta orang (menurun dari 11,98 juta orang pada bulan September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada bulan Maret 2023). Sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan juga mengalami penurunan sebanyak 0,22 juta orang dalam periode yang sama (menurun dari 14,38 juta orang pada bulan September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada bulan Maret 2023). Selain itu, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 7,29%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data pada bulan September 2022

yang mencapai 7,53 persen. Di samping itu, persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 12,22 persen, juga mengalami penurunan dari tingkat 12,36 persen pada bulan September 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan. Program ini diarahkan untuk menjadi prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021, dengan tujuan utama agar dana desa tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa-desa (Zaini, 2021). Keberadaan program SDGs Desa juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) yang selama ini diberikan kepada desa dengan tujuan menciptakan iklim inklusif dalam proses pembangunan. SDGs Desa membantu desa-desa untuk mengidentifikasi tujuan yang lebih jelas, terarah, dan dapat diukur. Dengan demikian, desa dapat lebih mudah mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan mereka. Program ini membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan memastikan bahwa pembangunan di desa-desa sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan (Musfira Basri et al., 2022). Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs Desa. Penggunaan Dana Desa harus memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai amanat dari Undang-Undang Desa. Pembangunan

ekonomi dan ketahanan pangan harus dikerjakan oleh pemerintah melalui arah kebijakan yang tepat. Sesuai dengan arahan dan tujuan Menteri Desa, pembangunan desa dapat mendukung pembangunan nasional (Desy Mediana Handayani, 2019).

Adapun latar belakang hadirnya program SDGs Desa adalah sebagai berikut: (1) Pentingnya dana desa dirasakan oleh seluruh warga desa, terutama mereka yang berada dalam golongan terbawah dari masyarakat; dan (2) Pembangunan desa harus memberikan dampak yang lebih nyata dan signifikan melalui fokus yang lebih jelas dalam pembangunan desa.

Tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia bervariasi, baik dari segi jumlah maupun persentasenya. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan ini meliputi situasi demografis, jumlah penduduk, dan kebijakan daerah masing-masing. Salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak luput dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba sebanyak 31,29 ribu jiwa dengan persentase 7,39 persen, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 31,31 ribu jiwa dengan presentase 7,43 persen. Walaupun mengalami penurunan, angka tersebut merupakan isu yang sangat serius. Terutama di wilayah pedesaan, di mana tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi (Pekab Bulukumba, 2023).

Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe merupakan salah satu desa di Kabupaten Bulukumba yang berpenduduk 5.350 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.396 pada tahun 2022 mengalami

peningkatan sebanyak 6 orang dengan jumlah 1.402 pada tahun 2023 (Rauf, 2023). Desa Garanta merupakan desa dengan pendapatan dana desa tertinggi di Kecamatan Ujung Loe dan hampir setiap tahunnya terus meningkat.

Adapun penyaluran dana desa sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Data Penyaluran Dana Desa Garanta

Tahun	Anggaran Dana Desa	BLT Desa	KPM BLT Desa
2021	Rp 1,121,092,000		30 KK
2022	Rp 1,416,768,000	Rp568,800,000	158 KK
2023	Rp 1,023,705,000	Rp100,800,000	

Sumber: (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2023)

Berdasarkan tabel di atas sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada tahun 2022, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar 158 Kartu Keluarga (KK) dimana mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dimana pada tahun 2021 jumlah KPM BLT sebanyak 30 KK. Dengan melihat jumlah KPM BLT yang cukup tinggi, dapat dinilai bahwa pengentasan kemiskinan di Desa Garanta masih dinilai belum baik. Hal ini mengindikasikan bahwa hingga saat ini, arah pembangunan di Desa Garanta belum sepenuhnya terarah dengan baik untuk mencapai kemandirian dan kemakmuran desa. Demikian pula, penggunaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi desa masih perlu diperbaiki

Kemiskinan dapat memiliki konsekuensi serius yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat desa seringkali menjadi korban kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Penelitian terdahulu mengenai SDGs dengan tujuan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Adi Nawir dkk (2022) dengan judul penelitian “Penerapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan”. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Polewali telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun Program SDGs ini masih dalam tahap perencanaan bagaimana program keberlanjutan, terkait dari implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa Polewali, namun untuk penerapannya sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakukan pendataan langsung kepada masyarakat dengan pembaharuan data 1 kali dalam 3 bulan. Hasil dari pendataan inilah yang akan menjadi acuan dari Pemerintah itu sendiri untuk melakukan perencanaan Desa mulai dari perencanaan pembangunan dan strategi yang harus dilakukan dalam hal khususnya di bidang kemiskinan. Pemerintah Desa Polewali dalam penerapan program SDGs untuk mengurangi angka kemiskinan telah melakukan hal yang mampu

mengurangi tingkat angka kemiskinan di Desa Polewali sesuai dengan tujuan dari program SDGs yaitu: meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, menjamin akses terhadap pelayanan desa, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana (Nawir et al., 2022).

Penerapan kebijakan SDGs dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi hasil program. Dengan demikian, program SDGs dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dalam mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian melihat (1) tingkat keluarga miskin di wilayah Desa Garanta sangat tinggi; (2) salah satu desa yang mengandalkan pertanian tanpa potensi lain; dan (3) Desa Garanta merupakan wilayah yang mudah dijangkau oleh peneliti. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “*Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam: Studi kasus Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba*”.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa dalam pengentasan kemiskinan

masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ?”.
2. Bagaimana penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perspektif ekonomi Islam di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ?”.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui straregi pemerintah Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dalam menerapkan *SustainableDevelopment Goals* (SDGs) desa dalam pengentasan kemiskinan masyarakat.
2. Mengetahui strategi pemerintah Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dalam menerapkan *SustainableDevelopment Goals* (SDGs) desa dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perspektif ekonomi Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam pengentasan kemiskinan khususnya masyarakat Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah Desa Garanta: Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi Pemerintah Desa Garanta dalam melaksanakan program SDGs dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa.
- b. Masyarakat: Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami hambatan dan tantangan yang terkait dengan program SDGs dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas serta siap menghadapi tantangan global dan lingkungan yang sangat dinamis agar dapat terwujud kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi, serta mewujudkan keunggulan kompetitif melalui jiwa kewirausahaan yang handal dan berdaya saing.
- c. Peneliti selanjutnya: Peneliti-peneliti yang akan datang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi

dalam upaya memecahkan masalah sosial yang terkait dengan program SDGs dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami permasalahan penelitian, penulis akan menjelaskan batasan penilaian dan fokus penelitian melalui definisi operasional. Hal ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun definisi operasional yang akan di jelaskan sesuai dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Tefa, 2016).

2. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

SDGs Desa adalah sebuah pendekatan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat kemiskinan di dalam suatu masyarakat atau negara.

4. Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, prinsip keadilan sosial memiliki peran penting. Secara keseluruhan, prinsip pengentasan kemiskinan dan prinsip-prinsip terkait kebijakan publik memiliki peran penting dalam panduan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan hasil penelitian dapat diatur secara efektif dan mudah dimengerti, diperlukan suatu metode pembahasan yang terstruktur. Dalam penelitian ini, pembahasan telah disusun dalam lima bab yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab yang saling terhubung. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang topik yang dibahas dalam setiap bab.

Bab *pertama*, pada bab ini mencakup penjelasan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pada bab ini akan di bahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan landasan

teori yang akan menjelaskan konsep *Sustainable Development Goals* dan pengentasan kemiskinan masyarakat perspektif ekonomi Islam.

Bab *ketiga*, terdapat informasi mengenai cakupan penelitian, termasuk jenis penelitian yang akan dilakukan, yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bab ini juga akan menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, mencakup jumlah informan yang akan diikutsertakan. Selain itu, dijelaskan sumber data yang akan digunakan, serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data tersebut. Bab ini juga akan menguraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, termasuk cara-cara yang diterapkan untuk menghasilkan data. Terakhir, akan dijabarkan instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data serta teknik analisis data yang akan diterapkan.

Bab *keempat*, dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian mengenai kebijakan dan dampak SDGs Desa dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perspektif ekonomi Islam di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Bab *kelima*, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan akan mencakup hasil temuan dari penelitian tentang pelaksanaan dan efek dari SDGs Desa dalam pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Garanta, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, rekomendasi yang diajukan oleh penulis akan berisi saran untuk penelitian masa depan yang relevan dengan topik yang telah diteliti.